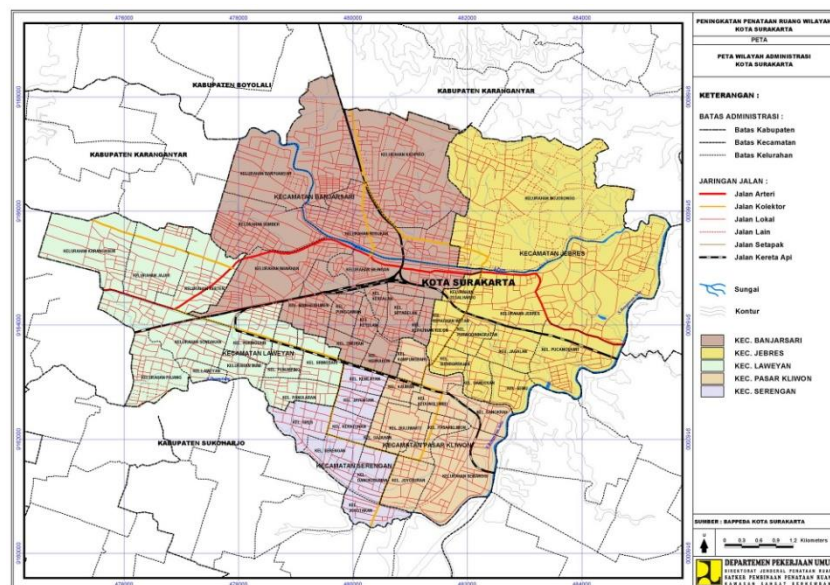


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana alam sudah tidak asing lagi bagi manusia, bagi masyarakat bencana adalah musibah yang tidak dapat diprediksi dan merugikan masyarakat. Hartuti & Purworini (2020) menyatakan bahwa bencana adalah suatu kejadian kerusakan dan guncangan yang dapat menyebabkan kehancuran pada struktur sosial dan populasi yang terkena dampak bencana masyarakat tidak bisa mengatasi hal tersebut dan membutuhkan pihak luar. Indonesia adalah negara yang sering terjadi bencana dari masa ke masa beberapa bencana alam yang sering melanda Indonesia antara lain banjir, tanah longsor, tsunami, gempa dan letusan gunung api merapi. Mengingat Indonesia masuk ke daerah rawan bencana, sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undang ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan bencana alam (Yulaelawati, 2008). Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang berada di negara Indonesia tepatnya di Jawa Tengah, Kota Surakarta terletak antara $110^{\circ}45'14''$ BT - $110^{\circ}45'35''$ BT dan $7^{\circ}36''$ LS - $7^{\circ}56''$ LS. Lihat peta Kota Surakarta pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Peta Administrasi Surakarta
Sumber : Bappeda Kota Surakarta, (2019)

Kota Surakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 M, dari permukaan laut. Kota Surakarta berbatasan di sebelah utara Kabupaten Boyolali, sebelah timur Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan dan barat Kabupaten Sukoharjo. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang dilewati oleh sungai bengawan Solo, sehingga menyebabkan Kota Surakarta menjadi wilayah rawan bencana banjir. Salah satunya terjadi pada bulan Desember 2007, banjir ini merupakan banjir terbesar setelah tahun 1966. Bencana banjir juga terjadi pada tahun 2009, serta 2010 pada saat itu sebagian daerah di Kota Surakarta terendam banjir, diantaranya masuk peringkat pertama dengan persentase 38% (Fatimah, 2014:1).

Bencana tentu menimbulkan krisis dalam aspek komunikasi hingga kebutuhan. Lembaga-lembaga bencana seperti BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), PVMBG (Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi), PMI (Palang Merah Indonesia), dan BNPP (Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan) yang tersedia di setiap daerah berfungsi mengulurkan tangan apabila krisis itu terjadi. Baik memberikan informasi sebelum bencana terjadi, baik memberikan informasi sebelum bencana melanda sebagai bentuk kesiapsiagaan, memberikan pertolongan pertama pada saat bencana, hingga memenuhi kebutuhan masyarakat korban bencana pasca terjadinya bencana alam. Lembaga pemerintah menggandeng lembaga non-profit hingga kelompok relawan yang dijadikan sebagai *stakeholder* guna menjalankan tugas dengan baik (Juneza, 2016).

Pemahaman tentang bagaimana respon yang harus dilakukan oleh masyarakat menjadi sangat penting dalam kesiapsiagaan masyarakat. Kesiapsiagaan bencana sebaiknya tidak hanya dilakukan pada saat pasca bencana, tetapi juga harus dilakukan pada saat pra bencana, sehingga dapat meminimalisir dampak dari bencana. Namun kesadaran dan kesiapsiagaan untuk mengantisipasinya masih jauh dari harapan. Upaya dalam penanggulangan bencana harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum bencana terjadi, hal ini meminimalisir korban maupun kerugian materi (Paramesti,

2011). Pemerintah telah memiliki sistem penanggulangan bencana alam yang komprehensif dimana sistem tersebut telah tercantum pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Semua telah di jelaskan dalam peraturan tersebut termasuk di dalamnya tahapan penanggulangan bencana, hak dan kewajiban masyarakat serta pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

Mitigasi bencana juga berfungsi sebagai bentuk kesiapsiagaan dan peringatan dini bagi masyarakat dalam menghadapi bencana (Tunggali A.P.P.W, Rasyid E, & Rahmawati W, 2019). Menurut UU No.24 tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi resiko dampak bencana bagi masyarakat yang berada didaerah rawan bencana maupun yang sedang dilanda bencana (Tunggali A.P.P.W, Rasyid E, & Rahmawati W, 2019). Mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural dan non-struktural yaitu, mitigasi dengan melakukan perbaikan secara fisik dan melakukan peningkatan kesiapsiagaan. Mitigasi bencana struktural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan pendekatan teknologi, contoh mitigasi struktural meliputi pembuatan kanal khusus untuk pencegahan bencana banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, dan bangunan yang bersifat tahan gempa, sedangkan mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana dalam lingkup pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan, contoh dari mitigasi non-struktural antara lain pembuatan tata ruang kota, dan *capitaly building* masyarakat. Kapasitas kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak serta-merta ada dan memiliki nilai yang baik pada setiap peserta didik namun perlu waktu dan usaha. Selama ini peningkatan kesiapsiagaan dan upaya mitigasi bencana telah dilakukan dalam proses pembelajaran. Namun hasil evaluasi tingkat kesiapsiagaan peserta didik menunjukan bahwa peserta didik masih belum siap dalam menghadapi bencana

dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi. Padahal materi mengenai kebencanaan sangat banyak dan harus dikuasai oleh peserta didik sebagai bekal dalam ketangguhan menghadapi bencana di Indonesia.

Pendidikan kebencanaan mencakup banyak aspek dan memiliki sebagian materi seputar kebencanaan. Misalnya pengenalan tentang potensi bencana yang di sekitar, histori bencana yang pernah terjadi, bentuk antisipasi, meningkatkan kesadaran tanda-tanda bencana, dampak bencana bagi individu, keluarga, dan komunitas, cara penanganan dalam kondisi bencana, serta bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana. Bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa diprediksi sebelumnya, baik itu bencana alam ataupun bencana non alam. Melalui pendidikan bencana, tidak berarti resiko dampak bencana dapat ditekan sehingga sama sekali tidak menimbulkan dampak. Tujuan dan harapan yang ingin dicapai melalui pendidikan bencana adalah mencapai minimal resiko dampak bencana. Pengurangan Risiko bencana (PRB) merupakan suatu kegiatan jangka panjang, sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dengan cara menggunakan pengetahuan, dan inovasi untuk membangun budaya selamat dan tangguh pada semua satuan pendidikan (Fajri, 2019).

Melalui bidang pendidikan diharapkan upaya mengurangi resiko bencana dapat disebarkan secara menyeluruh dan diperkenalkan sejak dini kepada seluruh peserta didik, tenaga pengajar, dan masyarakat sekolah baik di dalam kurikulum sekolah maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pengetahuan mengenai pengurangan risiko bencana secara khusus belum masuk ke dalam kurikulum di Indonesia (Wardani, 2019). Pendidikan untuk pengurangan risiko bencana alam telah diidentifikasi sebagai masalah inti. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 ayat 2, juga telah mengakomodasi kebutuhan pendidikan bencana dalam terminologi pendidikan layanan khusus, yakni pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa pendidikan mitigasi bencana yang dimasukkan ke dalam kurikulum tidak memiliki mata pelajaran khusus, menanggapi keputusan tersebut, Retno Listyarti selaku komisioner KPAI bidang pendidikan, memberikan usulan bahwa pendidikan mitigasi bencana dapat disisipkan kedalam mata pelajaran IPA dan IPS untuk SD dan SMP. Sedangkan untuk jenjang SMA dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran fisika dan geografi, guru memiliki peran penting untuk memberikan pembelajaran mengenai kebencanaan dan mitigasi bencana pada mata pelajaran geografi. Berkenaan dengan pembelajaran pada dasarnya setiap kegiatan pembelajaran harus dirancang terlebih dahulu sebagaimana tertulis dalam Permendiknas RI No.41 Tahun 2007 yaitu perencanaan proses pembelajaran meliputi penyusunan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, standar kompetensi, tujuan pembelajaran materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Seorang guru harus menguasai bahan ajar yang menjadi pegangan proses pembelajaran di dalam kelas.

Pada bulan Maret 2020 Indonesia menjadi salah satu negara yang turut terkena bencana pandemic covid-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia, pandemic covid-19 menyebabkan Indonesia turut mengeluarkan beberapa himbauan kepada publik, seperti seruan gerakan *work from home* dan seruan pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh hampir seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka melalui platform yang telah tersedia. Menurut Sanjaya (2020) menyatakan tersedia waktu yang cukup panjang untuk belajar, beradaptasi, dan membiasakan diri dengan beberapa produk teknologi informasi yang dikembangkan untuk pendidikan. Waktu yang cukup tersebut pada akhirnya dibatasi ketika wabah covid-19 masuk ketanah air, guru dan siswa bahkan orang tua dipaksa untuk beradaptasi secara cepat dengan strategi pembelajaran daring.

Guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat yang murah dan efisien meskipun sederhana dan bersahaja, tetapi merupakan keharusan dalam upaya

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Pemanfaatan media sangatlah penting untuk dilakukan oleh guru saat pembelajaran daring. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (Bahan pembelajaran) sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan pembelajaran (peserta didik) dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu (Falahudin, 2014). Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri, karena baik guru, murid, maupun orang tua murid harus beradaptasi dengan sistem ini, bukan berarti belajar secara daring tidak bisa efektif. Rohmawati (2015) mengatakan bahwa efektivitas pembelajaran merupakan salah satu standar mutu pendidikan dan sering kali diukur dengan tercapainya tujuan, atau dapat juga diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola suatu situasi *“doing the right things”*.

Pemkot Solo daerah Surakarta telah memutuskan memperpanjang masa pembelajaran di rumah dengan sistem dalam jaringan (daring), terkait dengan perkembangan virus corona yang semakin meluas maka pihak kepala Disdikbud Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta memperpanjang masa pembelajaran daring dari 13 April hingga menjadi 26 April 2020. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran dinas pendidikan kota Surakarta yang telah disampaikan ke sekolah-sekolah, pada proses pembelajaran guru memberikan materi menggunakan platform yang ada, disinilah peranan guru geografi di jenjang Sekolah Menengah Atas wajib memberikan materi mengenai pembelajaran materi mitigasi bencana alam secara menarik agar siswa memahami secara detail mengenai materi mitigasi bencana alam sesuai dengan bahan ajar. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Analisis Implementasi Pembelajaran Daring Pada Materi Mitigasi Bencana Alam Selama Pandemic Covid-19 Di SMA Batik 1 Surakarta Solo, Jawa Tengah”*.

B. Rumusan Masalah

Dengan tujuan untuk memperjelas permasalahan penelitian dan sesuai dengan latar belakang, peneliti dapat merumuskan permasalahan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pencapaian siswa selama pembelajaran daring terkait materi mitigasi bencana alam banjir di SMA Batik 1 Surakarta ?
2. Bagaimana implementasi pembelajaran daring di sekolah terkait materi mitigasi bencana alam banjir di SMA Batik 1 Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang terdapat dalam peneliti memiliki suatu jawaban yang ingin diraih oleh peneliti, sehingga tujuan peneliti dalam menyusun penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui hasil pencapaian siswa selama pembelajaran daring mengenai materi mitigasi bencana alam banjir di SMA Batik 1 Surakarta.
2. Untuk mengetahui implementasi pembelajaran daring yang di lakukan oleh guru geografi di sekolah terkait materi mitigasi bencana alam banjir di SMA Batik 1 Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Apapun yang di hasilkan oleh peneliti ini di harapkan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam dunia pendidikan umumnya, secara spesifik hal ini sangat bermanfaat :

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian teoritis dari peneliti ini adalah memberikan gambaran ilmu dan sumbangan ilmu yang berkaitan dengan implementasi pembelajaran daring terhadap mitigasi bencana alam banjir untuk pemahaman siswa SMA Batik 1 Surakarta.

2. Manfaat praktis

a. Bagi guru

Dapat digunakan sebagai bahan masukan khususnya guru pendamping yang mengajar siswa untuk meningkatkan implementasi pembelajaran daring terhadap materi mitigasi bencana alam banjir.

b. Bagi Peserta Didik

Memberikan gambaran informasi dan pemahaman mengenai mitigasi bencana alam banjir

c. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian secara daring serta menggunakan model pembelajaran secara daring.